

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bidang Kesehatan Di Kecamatan Towea Kabupaten Muna

La Ode Khairul Anfal Rafsanjani*, Triyanti Anugrahini

Universitas Indonesia

e-mail: *laode.khairul@gmail.com, triyantia@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan partisipatif dalam upaya membangun masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, partisipasi masyarakat lokal sangat ditekankan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dilakukan di Kecamatan Towea Kabupaten Muna. Secara khusus, penelitian ini melihat tahapan perencanaan partisipatif pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara mendalam yang dilakukan pada pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Pembangunan Desa (BPD), Pendamping Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Kecamatan Towea. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Towea telah berupaya dilakukan secara partisipatif dengan menghadirkan partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan terhadap rencana pembangunan yang akan dilakukan di Kecamatan Towea. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengumpulan informasi dan usulan melalui survey dan musyawarah dusun, dilengkapi dengan mengundang perwakilan tokoh untuk mendiskusikan terkait kebutuhan pembangunan pada tingkat desa. Namun sayangnya, dalam hal tindak lanjut terhadap masukan tersebut, masyarakat di Kecamatan Towea belum mendapatkan solusi atas apa yang menjadi kebutuhan mereka terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan agar dapat di akses terhadap semua masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perencanaan pembangunan kesehatan telah dilakukan secara partisipatif, namun dalam implementasinya usulan-usulan pembangunan tersebut belum menjawab kebutuhan pembangunan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Towea.

Kata kunci: perencanaan, partisipatif, kesehatan masyarakat

ABSTRACT

Participatory development planning is needed to improve the welfare of the community. For this reason, local community participation is emphasized so that development can be carried out in accordance with the needs of the community itself. This study aims to see how development planning in the health sector is carried out in Towea District, Muna Regency. In particular, this study looks at the stages of participatory health development planning in Towea District. This type of research is descriptive qualitative research using a literature study approach and in-depth interviews conducted at the sub-district government, village government, village development agency (BPD), village assistants, community leaders and the general public in Towea sub-district. The results of this study indicate that the development planning carried out in Towea District has attempted to be carried out in a participatory manner by presenting community participation in providing suggestions for development plans, that will be carried out in Towea District. The community is involved in the process of gathering information and suggestions through surveys and hamlet meetings, complemented by inviting representatives of prominent figures to discuss development needs at the village level. But unfortunately, in terms of following up on these inputs, the people in Towea District have not yet found a solution to what their needs are to improve the quality of health services so that they can be accessed by all communities. The conclusion of this study is that health development planning has been carried out in a participatory manner, but in its implementation these development proposals have not answered the health development needs of the community in Towea District.

Keywords: planning, participatory, public health

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, dimana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. (Aritonang, 2018).

Sejak diterbitkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan terintegrasi secara nasional mulai dari desa, daerah sampai pusat. Bahkan melalui SPPN ini masyarakat diberi ruang berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, daerah kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dengan partisipasi ini masyarakat pun mampu memperkuat posisi tawar dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa proses perencanaan yang berkualitas, maka pembangunan tidak akan optimal dalam mencapai hasil-hasilnya (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, 2015).

Permendes PD TT 17 tahun 2019 menguraikan tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Menurut regulasi ini, keterlibatan unsur masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan meliputi partisipasi dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa, menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis, mengorganisasi kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa, mendorong terciptanya pembangunan desa, dan memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di desa. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil perlu membuat program pembangunan inklusif yang berbasis masyarakat, dimana dalam program ini keterlibatan aktif masyarakat menjadi hal yang penting untuk merencanakan dan sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan di tingkat masyarakat desa. (Permendes PD TT, 2019).

Kurniawan menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan (Kurniawan, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan pembangunan partisipatif memberikan gambaran yang beragam dalam proses pelaksanaannya. Sedikitnya terdapat 3 pembahasan yang utama mengenai pembangunan partisipatif yang membahas dari sudut pandang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan partisipatif dan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan.

Pembahasan pembangunan partisipatif berdasarkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ingin melihat bagaimana peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan, proses serta koordinasinya dalam tingkat desa maupun kecamatan. Maryam (2015) melakukan penelitian dengan pembahasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan menitikberatkan penelitiannya pada tingkat kehadiran masyarakat dalam agenda musrenbangdesa dan sumbangan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat dalam forum musyawarah tersebut, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kegiatan musrenbangdesa. Suwandi dan Rostyaningsih (2012) lebih melihat pada proses yang berlangsung dalam musrenbangdesa, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut.

Selain partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa, beberapa penelitian membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan. Imtihan, Wahyudi dan Firmansyah (2017) meneliti tentang musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dimana dalam penelitiannya ingin melihat proses pengambilan keputusan dalam penentuan usulan rencana pembangunan. Sebelumnya, Purnamasari (2008) juga telah melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan di tingkat kecamatan dengan menitikberatkan kajiannya pada proses perencanaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada pembahasan mengenai implementasi pembangunan partisipatif, Lisnawati dan Lestari (2019) melakukan penelitian dalam hal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati. Selain itu, Lisnawati dan Lestari juga membahas mengenai pembahasan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di tingkat desa. Safitri, dkk (2020) meneliti mengenai implementasi pembangunan partisipatif dari sudut pandang partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan di tingkat desa. Sari (2016) dalam penelitian membahas tentang implementasi pembangunan partisipatif dari sudut pandang keterlibatan masyarakat dalam pertemuan yang membahas tentang proses pembangunan yang sedang berlangsung di desa. Selain itu, Sari juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi pembangunan.

Pembahasan mengenai efektivitas Musyawarah perencanaan pembangunan, Toar, dkk (2019) melakukan penelitian tentang ketepatan sasaran dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan serta kepuasan masyarakat terhadap hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Senada dengan Toar, dkk, Hendri, Purnaningsih dan Saleh (2014) melakukan penelitian serupa dengan lingkup yang lebih kecil di tingkat kelurahan. Setyadiharja (2018) melakukan penelitian tentang efektivitas dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian dengan fokus yang sama juga dilakukan oleh Munsir (2020) yang meneliti tentang efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Beberapa hal tersebut perlu menjadi bahan telaah lebih lanjut dimana penekanan dalam hal pembangunan partisipatif masih sangat relevan untuk dilakukan terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Hal ini diangkat kesenjangan penelitian yang ditemukan sebagai berikut:

1. Banyak dari penelitian yang dilakukan memberikan gambaran bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam tingkat desa maupun Kecamatan hanya dilakukan sebagai formalitas dimana aspirasi masyarakat ditampung namun pengambilan keputusan tetap menjadi kewenangan pemerintah.
2. Kualitas perencanaan pembangunan yang telah disepakati menjadi dipertanyakan karena proses formalitas yang berjalan.
3. Masih sedikit penelitian yang membahas mengenai isu-isu perencanaan yang spesifik pada pembangunan terutama bagaimana isu kesehatan dan pendidikan diakomodasi dalam pembangunan desa dan kecamatan.

Kecamatan Towea merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Muna dan termasuk dalam kategori Kecamatan Tertinggal. Status Kecamatan Towea pada tahun 2019 termasuk kedalam kategori Tertinggal, dimana angka IDM yang mampu dicapai merupakan yang paling rendah diantara Kecamatan se-Kabupaten Muna. Kondisi ini yang kemudian menjadi hal menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan tersebut dilakukan.

Pembangunan kesehatan masyarakat Kecamatan Towea masih mengalami banyak kendala untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan primer maupun tingkat lanjut (pelayanan kesehatan Rumah Sakit). Dalam hal pemenuhan sarana kesehatan, di Kecamatan Towea saat ini terdapat 1 Puskesmas Induk yang melayani masyarakat dalam 1 Kecamatan. Untuk menunjang pemenuhan upaya kesehatan, di setiap Desa terdapat 1 unit Puskesmas Pembantu yang didirikan. Sayangnya, Puskesmas Pembantu tersebut masih belum berfungsi dengan optimal karena tidak ada tenaga yang tetap tinggal disana untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan dasar masih berpusat di Puskesmas Utama yang untuk terletak di desa Moasi yang untuk mencapainya masih harus menyeberangi laut dengan menempuh 1.5 jam perjalanan. Data BPS Kabupaten Muna pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis untuk Kecamatan Towea pun jumlahnya sangat terbatas, yakni 3 orang perawat, 4 orang bidan, 1 orang dokter umum dan 1 orang tenaga kesehatan masyarakat yang wilayah tugasnya meliputi satu wilayah Kecamatan Towea.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan partisipatif dalam pembangunan desa, yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif di bidang kesehatan di Kecamatan Towea.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam tentang implementasi pembangunan partisipatif dalam pembangunan desa di Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Neuman, 2014). Penelitian ini ingin menggambarkan secara rinci bagaimana implementasi pembangunan partisipatif dalam pembangunan desa di Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berdasarkan dimensi waktu dapat dikategorikan sebagai *cross sectional*.

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Kecamatan Towea, dengan alasan bahwa wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai Kecamatan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) terendah di Kabupaten Muna dengan akses pelayanan sosial yang didapatkan masyarakat juga masih dapat dikategorikan sangat minim. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga juni 2021.

Data yang ingin dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan di lapangan pada lokasi penelitian melalui wawancara maupun observasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kecamatan Towea, Pemerintah Desa di Kecamatan Towea, Badan Pembangunan Desa di Kecamatan Towea, Pendamping Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Kecamatan Towea.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Analisa induktif berguna untuk melihat pola hubungan dari data-data yang dikumpulkan, namun demikian dalam analisa kualitatif ini tidak menggambarkan secara luas berdasarkan statistik.

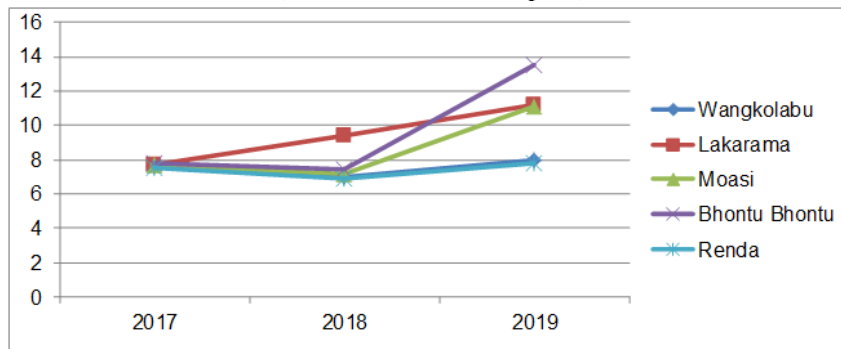
Analisis data ini terbagi menjadi 3 data yaitu *data satu* merupakan pengumpulan data sebagai data dasar yang berasal dari pengalaman dari peneliti selama turun lapangan yang terdiri dari: *listen, observe, interview*. Dalam penelitian ini kegiatan yang ada dalam data satu dilakukan dengan lengkap untuk memperoleh data primer dan sekunder di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Towea, Kabupaten Muna. *Data dua* yaitu, perekaman data, yang terdiri dari *sound recording, visual recording*, dan *field notes* atau catatan lapangan. Khusus untuk *field notes* terlebih dahulu dituliskan *jotted notes* (saat di lapangan, menuliskan sesuatu yang menarik perhatian dan sesuai dengan “*joy the memory*” atau “kegembiraan pada ingatan penduduk”). Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan alat bantu, yaitu catatan lapangan (buku kecil), kamera digital dan alat perekam. *Data tiga* yaitu, penyeleksian dan pemrosesan data dalam sebuah laporan akhir, yang terdiri dari: sortir, klasifikasi, pengkodean (*Open, Axial coding and selective coding*), dalam seleksi pengkodean (selain dari data 2 dapat pula didapat dari *other resources*, seperti peta dan dokumen), kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dan elaborasi. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan membuat taksonomi (pengelompokkan data) untuk menjamin kredibilitas data, yang dimaksudkan untuk merangkum bahasan yang menyangkut kualitas dari penelitian itu sendiri (Neuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan Kesehatan di Kecamatan Towea

Pembangunan desa dan perencanaan di tingkat Kecamatan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perbaikan capaian dalam output pelayanan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta memperbaiki capaian perekonomian, namun dalam praktiknya ternyata belum mampu untuk memperbaiki indikator kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Towea. Berdasarkan data yang diakses melalui Pusat Data Desa Indonesia memperlihatkan hal yang sebaliknya. Pada grafik dibawah memperlihatkan besaran alokasi dana desa yang diterima di desa-desa Kecamatan Towea mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana peningkatan alokasi dana desa secara signifikan terjadi di tahun 2019.

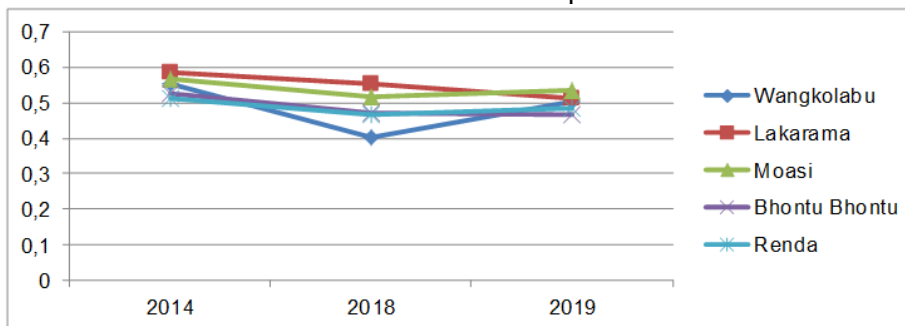
Besaran Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Towea tahun 2017-2019
(dalam Ratus Juta Rupiah)



Gambar 1 Besaran Alokasi Dana Desa Kecamatan Towea tahun 2017-2019 (Sumber: Pusat Data Desa Indonesia, 2020)

Namun, capaian dari pembangunan desa melalui Indeks Desa Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperlihatkan kondisi yang sebaliknya dimana capaian IDM desa-desa di Kecamatan Towea secara konsisten mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sejumlah 3 desa termasuk kedalam kategori status desa tertinggal, dan 2 desa lainnya dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal (Pusat Data Desa Indonesia, 2020). Hal ini yang menyebabkan Kecamatan Towea menjadi Kecamatan yang paling rendah dalam capaian IDM di Kabupaten Muna. Nilai IDM desa-desa di Kecamatan Towea dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Nilai Indeks Desa Mandiri Dari Waktu Ke Waktu pada Desa Di Kecamatan Towea

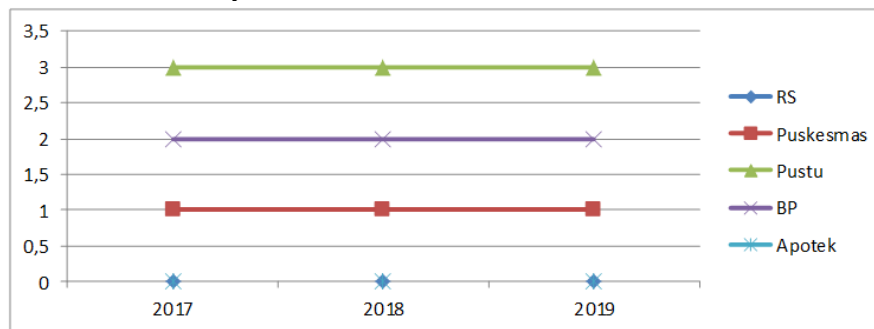


Gambar 2 Nilai Indeks Desa Mandiri (IDM) Desa di Kecamatan Towea tahun 2017-2019 (Sumber: Pusat Data Desa Indonesia, 2020)

Layanan kesehatan jumlahnya masih sedikit dengan akses terhadap puskesmas yang sulit karena terpisah lautan. Disisi lain, Puskesmas utama di Kecamatan Towea yang difungsikan sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan tidak menampung rawat inap. Dalam kondisi yang darurat, pemenuhan kesehatan masyarakat dirujuk ke Rumah Sakit Daerah berada di Ibukota Kabupaten Muna dengan menempuh perjalanan laut 1,5 jam perjalanan ditambah perjalanan darat sekitar 30

kilometer. Grafik perkembangan jumlah layanan kesehatan dari tahun 2017-2019 dapat terlihat seperti pada gambar dibawah ini:

Jumlah Layanan Kesehatan Kecamatan Towea 2017-2019



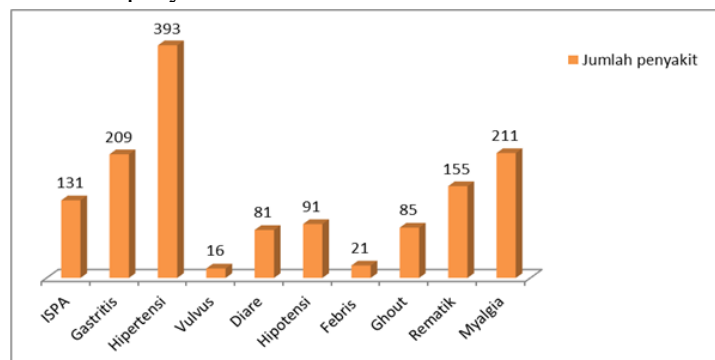
Gambar 3 Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Kecamatan Towea 2017-2019
(Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, 2020)

Puskesmas Towea merupakan satu-satunya pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Towea untuk memperoleh bantuan dan pelayanan kesehatan, sedangkan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan yang terletak di desa seringkali kosong akibat tidak ada tenaga yang tinggal. Buku data dasar Puskesmas Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019) menunjukkan bahwa Puskesmas Towea melayani penduduk 5.246 jiwa yang tersebar di 5 desa. Wilayah kerja Puskesmas Towea termasuk dalam kategori sangat terpencil, dengan kemampuan penyelenggaraan puskesmas Towea termasuk kedalam status non-rawat inap. Kondisi bangunan Puskesmas rusak ringan, dan telah terakreditasi C dalam pelayanannya. Puskesmas Towea tidak memiliki kendaraan ambulans dan kendaraan untuk melakukan kegiatan puskesmas keliling. Sedangkan kendaraan operasional Puskesmas adalah 1 unit sepeda motor.

Pelayanan di Puskesmas Towea masih berstatus Rawat Jalan dan belum menerima untuk pasien rawat inap. Puskesmas Towea tidak memiliki fasilitas rumah bersalin, klinik pengobatan, praktek dokter dan apotek. Data profil Puskesmas Towea tahun 2019 memperlihatkan bahwa jumlah cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas Towea tahun 2019 sebanyak 194 selama 1 tahun, dan tidak ada kunjungan rawat inap. Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Towea yakni 1 dokter umum, 3 perawat dan 5 bidan. Tidak ada tenaga kefarmasian maupun apoteker. (Puskesmas Towea, 2019)

Penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat yaitu penyakit Hipertensi dengan jumlah 393 orang, penyakit Myalgia dengan jumlah 211 orang, penyakit Gastritis dengan jumlah 209 orang, penyakit Rematik dengan jumlah 155 orang, penyakit ISPA dengan jumlah 131 orang, penyakit Hipotensi dengan jumlah 91 orang, penyakit Gout dengan jumlah 85 orang, penyakit Diare dengan jumlah 81 orang, penyakit Febris dengan jumlah 21 orang dan penyakit Vulnus dengan jumlah 16 orang (Puskesmas Towea, 2019). Hal ini terlihat dari grafik dibawah ini:

Grafik Sepuluh besar penyakit di Puskesmas Towea Kecamatan Towea Tahun 2019



Gambar 4 Sepuluh besar jumlah penyakit terbanyak di Kecamatan Towea
(Sumber : Profil Puskesmas Towea, 2019)

Berdasarkan data diatas diperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Towea sangat terbatas dalam hal pelayanan maupun cakupan. Hal ini disebabkan karena status puskesmas Towea yang masih rawat jalan sehingga sangat terbatas dalam jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah kunjungan rawat jalan pasien di Puskesmas pun sangat rendah. Tercatat pada tahun 2019, kunjungan rawat jalan pasien ke Puskesmas Towea tercatat hanya 194 kunjungan rawat jalan. Hal ini disebabkan oleh akses yang sulit menuju ke puskesmas karena wilayah kerja Puskesmas merupakan wilayah kepulauan sepenuhnya. Masyarakat merasa kesulitan dalam hal memanfaatkan puskesmas untuk mencari bantuan kesehatan mereka. Selain itu, pelayanan kesehatan di Puskesmas Towea belum maksimal karena terkendala oleh jaringan listrik yang sangat terbatas dan hanya menyala pada malam hari.

Kajian Terhadap Permasalahan Kesehatan di Kecamatan Towea

1. Faktor Predisposisi

Kecamatan Towea memiliki 1 Puskesmas dengan status rawat jalan yang melayani keperluan kesehatan seluruh masyarakat di Kecamatan Towea yang merupakan wilayah kepulauan. Kehadiran Puskesmas ini dirasakan masih belum cukup untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dimana permasalahan akses dan keterjangkauan layanan yang sangat terbatas masih dirasakan oleh masyarakat Towea baik dalam hal pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat maupun pemeriksaan kesehatan perorangan. Hal ini terbukti dengan rendahnya angka kunjungan rawat jalan pada puskesmas Towea di tahun 2019 dimana hanya ada 194 orang yang melakukan pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan di Kecamatan Towea pun disebutkan tidak maksimal karena puskesmas pembantu yang berada di desa tidak berfungsi dengan maksimal karena permasalahan fasilitas yang minim, tenaga yang bertugas tidak ada, maupun bangunan puskesmas pembantu yang memerlukan renovasi.

Dalam hal kesehatan masyarakat, perilaku kesehatan masyarakat Kecamatan Towea masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah masyarakat yang memiliki dan memanfaatkan jamban sebagai fasilitas MCK. Masyarakat sebagian besar masih melakukan aktivitas BAB dan membuang sampah di laut. Kondisi perilaku kesehatan masyarakat ini membuat diare masih menjadi salah satu penyakit yang termasuk dalam 10 besar jumlah penyakit di Kecamatan Towea pada tahun 2019.

2. Faktor Penguat

Di Kecamatan Towea sendiri belum ada apotek yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, jadi ketika sakit masyarakat kesulitan untuk mencari pertolongan pengobatan. Selain itu, status Puskesmas Towea yang masih rawat jalan juga dianggap suatu kendala bagi masyarakat. Sebenarnya di semua Desa di Kecamatan Towea telah ada bangunan Puskesmas Pembantu namun tidak beroperasi setiap hari karena tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga dan hanya dibuka ketika ada kegiatan saja. Di Puskesmas Towea sendiri hanya beroperasi setengah hari dan tidak ada pelayanan rawat inap maupun *One Day Care* sehingga ketika ada anggota masyarakat ada yang sakit dan membutuhkan pelayanan rawat inap harus mencari keluar Kecamatan Towea (dirujuk ke Puskesmas Tampo atau ke RSUD Raha). Tidak adanya aliran listrik ketika pelayanan berlangsung juga membuat layanan kesehatan di Puskesmas Towea terhambat dimana beberapa peralatan medis dan laboratorium tidak bisa digunakan. Dari sisi bangunan, Puskesmas Towea merupakan bangunan baru dan masih sangat layak pakai. Namun kondisi berbeda dengan bangunan pustu yang tidak dimanfaatkan dan cenderung terbengkalai hingga membutuhkan renovasi. Dari informasi yang diterima tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Towea masih belum lengkap.

Petugas kesehatan yang bertugas di Kecamatan Towea tidak ditekankan untuk hadir setiap hari memberikan pelayanan di Puskesmas melainkan saling berkoordinasi agar setiap hari ada yang bertugas jaga dan mengisi pelayanan. Tenaga kesehatan Puskesmas Towea pun dikatakan pekerjaannya santai karena status pelayanan puskesmas yang masih rawat jalan.

Selain itu, pada gambar 4.4 diatas memperlihatkan pegawai kesehatan Puskesmas Towea sedang menempuh perjalanan melalui laut untuk menuju ke Puskesmas dimana tempat tinggal mereka berasal dari luar wilayah Kecamatan Towea. Berdasarkan berbagai informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumberdaya tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Towea masih sangat minim karena sebagian besar tempat tinggal mereka berasal dari luar wilayah tersebut dan harus menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk mencapai Puskesmas Towea.

3. Faktor Sosial dan Spiritual

Masyarakat Towea masih mempercayai mitos dan menggunakan bantuan dukun untuk mengobati penyakitnya. Selain itu, masyarakat Kecamatan Towea masih mempertahankan perilaku yang tidak sehat seperti membuang sampah di sembarang tempat buang air besar di laut, hanya sedikit anggota keluarga yang membangun WC. Dalam hal pemanfaatan layanan kesehatan pun masyarakat di Kecamatan Towea masih dikatakan jarang dimana masyarakat ketika sakit hanya bertahan di rumah saja, tanpa mencari bantuan layanan kesehatan maupun ke tenaga kesehatan terdekat. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kesehatan masih minim dimana masyarakat belum mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada, mencari bantuan terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan, berperilaku hidup bersih dan sehat serta masih mempercayai dukun sebagai alternatif pengobatan.

4. Faktor Perilaku dan Gaya Hidup

Masyarakat Towea dalam memperoleh layanan kesehatan harus menempuh perjalanan yang jauh dengan satu-satunya moda transportasi yang dapat digunakan melalui laut. Disamping itu, dalam mencapai layanan kesehatan yang memadai masyarakat kecamatan Towea yang harus ke kota yang juga membutuhkan perjalanan yang lebih jauh lagi. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya memeriksakan diri bersama pada saat posyandu dilaksanakan dan harus menunggu beberapa hari kemudian untuk obat atas penyakit yang mereka alami sampai lagi karena masyarakat jarang yang memanfaatkan fasilitas pengobatan di Puskesmas Towea. Seringkali, masyarakat Kecamatan Towea menyeberang ke Tampo untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan di Kecamatan Towea sulit melihat jarangnyanya masyarakat untuk melakukan kunjungan ke Puskesmas Towea dan akses yang ditempuh membutuhkan waktu perjalanan yang relatif lama dan menggunakan jalur laut.

Perencanaan Partisipatif Bidang Kesehatan di Kecamatan Towea

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara berencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial di lingkungan/daerah/wilayah dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, Pemerintah Kecamatan Towea melakukan suatu perencanaan pembangunan guna merumuskan agenda pembangunan yang akan diusulkan dan kemudian dilaksanakan satu tahun kedepan. Salah satunya yang dibahas adalah mengenai perencanaan di bidang kesehatan. Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Towea Kabupaten Muna.

1. Melakukan observasi lapangan

Observasi lapangan adalah kegiatan untuk memantau kondisi masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD). KPMDD turun ke lapangan untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat dan bertanya kepada masyarakat mengenai pembangunan apa yang saat ini mereka butuhkan. Survey yang dilakukan oleh KPMDD ini selain berguna

untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setempat untuk diusulkan, juga berfungsi untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat guna menunjang perbaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain KPMD, juga ada kader-kader kesehatan yang melakukan pemantauan kesehatan masyarakat dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

2. Mengundang perwakilan para tokoh

Selain dengan melakukan survey lapangan yang dilakukan oleh KPMD dan kader kesehatan, penilaian kebutuhan pembangunan masyarakat juga melalui pihak pemerintah desa maupun kecamatan mengundang perwakilan para tokoh setempat untuk berkoordinasi. Perwakilan para tokoh ini diundang dan duduk bersama pemerintah setempat dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat mengenai rencana pembangunan yang akan diusulkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan. Pihak pemerintah desa maupun kecamatan secara aktif berdiskusi dengan perwakilan masyarakat untuk meminta pertimbangan usulan yang akan disampaikan dalam musrenbang.

3. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan

Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah tingkat dusun hingga tingkat kecamatan sebelum hasilnya dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.

a). Musyawarah dusun, dilakukan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Musyawarah dusun dihadiri oleh perwakilan masyarakat untuk menerima masukan dari masyarakat dan membahas seputar masukan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti ke musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Selain itu, musyawarah dusun juga membahas hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa setempat.

b). Musyawarah perencanaan pembangunan desa, diadakan setiap tahun sekali untuk membahas arah prioritas pembangunan desa, usulan yang sebelumnya telah terkumpul melalui musyawarah dusun, observasi lapangan maupun diskusi dengan para tokoh desa. Dalam musrenbangdesa kemudian prioritas pembangunan yang sebelumnya telah diusulkan tersebut kemudian dipilih yang mana menjadi isu strategis dan prioritas untuk dibangun. Isu kesehatan dan pendidikan termasuk kedalam isu prioritas yang diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dimana yang menjadi fokus penanganannya adalah pada stunting dan pengadaan PAUD.

c). Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan Towea. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan setelah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa telah selesai. Dalam musrenbang kecamatan, usulan dari setiap desa dikumpulkan dan didiskusikan kembali usulan mana yang akan diteruskan ke musrenbang kabupaten.

4. Pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan

Pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan dilakukan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa maupun pendamping desa untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang akan atau telah dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa, dan masyarakat agar dapat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah desa juga ketika telah selesai melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tetap berkoordinasi dan meminta pertimbangan dari pemerintah kecamatan mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan adalah pada proses perumusan umum, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, kebutuhan, dan kepentingan dasar, dalam kerangka perencanaan bisa menjadi wahana untuk mengubah skema politik lama menjadi partisipatif (Abe, 2002). Dalam hal ini kita dapat melihat pada masyarakat di Kecamatan Towea, betapa masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan sangat diharapkan sehingga dilakukan berbagai macam upaya dalam menggali masukan dan saran dari

masyarakat. Masyarakat diharapkan melalui serangkaian upaya ini dapat berperan dan memberikan kontribusi masukan dan pemikiran mengenai apa yang dibutuhkan dalam upaya pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea. Sehingga melalui upaya yang dilakukan dapat kita katakan bahwa pemerintah kecamatan towea berupaya menghadirkan skema partisipatif dalam hal perencanaan pembangunan khususnya pembangunan di bidang kesehatan.

Penekanan partisipasi masyarakat dalam konsep perencanaan pembangunan partisipatif di bidang kesehatan juga menekankan pada jalinan kemitraan yang dibangun berdasarkan proses dialogis diantara berbagai stakeholders untuk menyusun agenda bersama, dalam pandangan, pengalaman lokal dan untuk dihargai dan ditindaklanjuti (Khairudin, 2000). Hal ini dapat terlihat pada perencanaan pembangunan yang dilakukan di kecamatan Towea berupaya untuk membangun kemitraan antara pemangku kepentingan sehingga dapat tercipta keselarasan dalam rencana pembangunan yang akan dilakukan. Di Kecamatan Towea, proses diskusi perencanaan pembangunan yang dilakukan berupaya untuk menampung seluruh aspirasi yang ada dari masyarakat yang kemudian akan didiskusikan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan. Namun sayangnya, ketika melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa maupun kecamatan, masukan dari masyarakat yang sebelumnya telah ditampung akan ditinjau kembali dan dipilih mana yang paling sesuai dengan prioritas pembangunan. Disini terkadang masukan dari masyarakat menjadi hilang dan tereliminasi dari daftar usulan ketika tidak ada yang melakukan pengawalan terhadap usulan tersebut.

Dalam hal pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas dan mampu menjangkau setiap masyarakat sangat diharapkan mengingat keterbatasan jangkauan dari layanan puskesmas terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dengan rendahnya angka kunjungan pasien rawat jalan pada puskesmas towea, dimana masyarakat membutuhkan akses layanan kesehatan yang dekat dengan mereka melalui pos kesehatan desa maupun puskesmas pembantu yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal masyarakat. Namun, kondisi terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan ini masih belum mendapatkan solusi dan belum masuk kedalam program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan. Usulan pemerintah dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea melalui dana desa adalah seputar program stunting semata. Disisi lain, fasilitas kesehatan di Kecamatan Towea belum lengkap dan membutuhkan pengadaan terkait dengan perbaikan sarana gedung puskesmas pembantu, maupun kelengkapan peralatan kesehatan yang menunjang pemeriksaan.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang kesehatan di kecamatan Towea telah dianggap berupaya maksimal dalam menggali berbagai masukan dari masyarakat tentang apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Namun sayangnya, dalam hal tindak lanjut terhadap masukan tersebut, masyarakat di Kecamatan Towea belum mendapatkan solusi atas apa yang menjadi kebutuhan mereka terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan agar dapat di akses terhadap semua masyarakat. Kedepannya, permasalahan mengenai fasilitas layanan, akses, tenaga dan kader kesehatan seharusnya masuk ke dalam perencanaan program pembangunan yang harus didekatkan kepada masyarakat.

Arnstein (Sari, 2018) mengemukakan delapan tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu pembangunan yang meliputi manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power dan citizen control. Kedelapan tingkatan ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar.

- a. Kelompok pertama ialah *Degrees of Citizen Power* dimana merupakan tahapan partisipasi masyarakat yang paling tinggi. Tahap pertama yakni *Citizen Control*, dimana Masyarakat berpartisipasi sepenuhnya dalam keseluruhan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan bahkan bantuan dana. Tahap kedua yakni *Delegated Power*, pada tahapan ini masyarakat berpartisipasi untuk membentuk keputusan tertentu dalam penyelesaian masalah. Tahapan ketiga yakni *Partnership*, yaitu Masyarakat memiliki kekuasaan untuk berunding dengan pihak pelaksana dalam pengambilan keputusan.
- b. Kelompok kedua yakni *Degrees of Tokenism* dimana merupakan tahapan partisipasi menengah yang hanya memberdayakan sedikit partisipasi dari masyarakat. Terdapat 3 tahapan yang termasuk pada kelompok ini, antara lain: *Placation*, merupakan tahap

bahwa pihak pemerintah memiliki kekuasaan untuk menunjuk perwakilan dari masyarakat kemudian memiliki akses pada pengambilan keputusan. Dilanjutkan dengan tahap *Consultation*, Partisipasi masyarakat dilakukan melalui *public hearing*. Melalui pendapat tersebut dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tahapan *Informing*, dimana Pihak pemerintah hanya memberikan informasi pada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini, masyarakat mulai tidak diberdayakan.

- c. Kelompok ketiga yakni *No Power*. Dalam kelompok ini, masyarakat tidak memiliki kedaulatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Yang termasuk dalam tahapan ini adalah Tahapan *Therapy*, tahapan yang mana pemerintah berpura-pura melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat sesuai dengan kepentingan pemerintah. Dan Tahapan paling bawah dalam partisipasi, adalah Tahap *Manipulation*, pada tahapan ini, masyarakat tidak melakukan partisipasi sama sekali. Kegiatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik, sekalipun kondisi tidak sesuai dengan faktanya.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea termasuk kedalam tingkatan *consultation* (konsultasi), dimana pada tahap ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengundang masukan dan usulan dari masyarakat setelah mereka diberikan informasi. Usulan masyarakat kemudian ditampung dan dijadikan usulan dari masyarakat tanpa ada jaminan bahwa usulan dan ide masyarakat tersebut akan diperhatikan. Penjaringan usulan dari masyarakat lokal dilakukan melalui musyawarah dusun, survey dan observasi lapangan oleh KPMD, dan dengan pendapat melalui konsultasi dan mengundang perwakilan para tokoh.

Analisis Perencanaan Partisipatif Bidang Kesehatan di Kecamatan Towea

Mayer (1985) mengemukakan model perencanaan yang rasional terdiri dari enam langkah yaitu *determination of goals, assessment of needs, specification objectives, design of alternative actions, estimation of concepts of alternative actions dan selection of source of action*. Mengikuti langkah yang disebutkan oleh Mayer tersebut, maka tahapan perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Determination of goals*. Pada tahapan ini, Mayer mengungkapkan bahwa tujuan perencanaan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi maupun undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan di tingkat desa telah memiliki aturan yang jelas disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional dengan cita-cita ideal agar terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Aturan ini yang kemudian menjadi landasan utama dalam pembangunan masyarakat desa sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan desa di Kecamatan Towea sudah diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional agar tercipta dengan yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.
- b. *Assessment of needs*, merupakan permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik, dimana penilaian kebutuhan merupakan suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat yang diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya. Penilaian kebutuhan pembangunan bagi masyarakat desa di Kecamatan Towea dilakukan melalui agenda observasi lapangan dengan melakukan serangkaian survey oleh KPMD dan mengundang perwakilan tokoh untuk diajak melakukan diskusi. Dari tahapan ini, kebutuhan masyarakat akan pembangunan dapat tergali yang diharapkan

- dapat dijawab atau diselesaikan oleh pembuat keputusan di Kecamatan Towea atau Kabupaten Muna.
- c. *Specification of objectives*, merupakan tahapan untuk menetapkan sasaran atau hasil yang ingin dicapai yang merupakan definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea, tahapan ini masuk dalam agenda musyawarah dusun dimana dari kebutuhan masyarakat yang telah tergali kemudian dipilih mana yang paling prioritas untuk diselesaikan dan dijadikan fokus utama pembangunan di wilayah lokal tersebut. Kebutuhan akan pembangunan mungkin akan berbeda-beda masing-masing dusun karena setiap wilayah menghadapi permasalahannya sendiri-sendiri. Sekalipun begitu, tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui desa yang kuat, maju mandiri dan demokratis.
 - d. *Design of alternatives action*, merupakan langkah untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan ini menggambarkan adanya upaya musyawarah untuk memilih kegiatan pembangunan apa yang akan diusulkan ke tingkatan selanjutnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea, tahapan ini masuk pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Usulan dari musrenbang yang dibahas di tingkat desa kemudian disepakati dan diusulkan ke tingkat kecamatan.
 - e. *Estimation of consequences of alternative actions*, pada tahapan ini dilakukan analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan. Pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Towea, membahas mengenai berbagai masukan dan usulan dari semua desa yang ada di Kecamatan Towea. Pada kegiatan tersebut didiskusikan terkait pembangunan apa yang paling sesuai dan prioritas dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kecamatan Towea. Setelah dimusyawarahkan, berbagai usulan yang ditampung kemudian dilakukan seleksi kembali sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, lalu ditetapkan menjadi usulan kecamatan Towea dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Muna.
 - f. *Selection of source of action*, merupakan tahapan terakhir dimana pada tahapan ini dipilih tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang sebelumnya telah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Towea. Penetapan rencana pembangunan di Kecamatan Towea disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Muna dimana usulan perencanaan pembangunan yang diusulkan dilakukan kajian lebih lanjut untuk kemudian diputuskan apakah masuk dalam program pembangunan satu tahun kedepan, atau ditolak karena dianggap tidak menjawab sisi urgensi maupun kebutuhan masyarakat secara umum.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea telah berupaya menghadirkan partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan terhadap rencana pembangunan yang akan dilakukan. Masyarakat umum dilibatkan dalam proses pengumpulan informasi dan usulan melalui survey dan musyawarah dusun, serta usulan pula dilengkapi dengan cara mengundang perwakilan tokoh untuk mendiskusikan terkait kebutuhan pembangunan pada tingkat desa. Selanjutnya pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, berbagai usulan yang telah ditampung tersebut kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi usulan desa untuk dibawa ke musyawarah perencanaan tingkat kecamatan. Setelah dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, usulan dari berbagai desa yang sudah disepakati kemudian dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Muna untuk disetujui oleh para pengambil keputusan. Tahapan ini telah sesuai dengan model perencanaan rasional menurut Mayer (1985) dimana ada enam tahapan perencanaan rasional

dan setiap tahapan yang dilalui dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Towea telah memenuhi aspek dari enam tahapan tersebut.

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan di kecamatan Towea telah berupaya menggali usulan kebutuhan pembangunan dari masyarakatnya melalui beberapa cara seperti observasi lapangan, melibatkan para tokoh untuk mendengarkan masukan, melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dusun untuk mendengarkan masukan dan usulan dari warga, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Berbagai masukan dan usulan ini ditampung untuk kemudian dibahas pada forum musrenbang kecamatan dan diperoleh usulan untuk dibawa ke tingkat kabupaten.

Wilayah Kecamatan Towea merupakan kepulauan dimana kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang memadai menjadi penting di Kecamatan Towea. Sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tidak diikuti dengan pembangunan kesehatan yang dilakukan di Kecamatan Towea. Arah prioritas pembangunan kesehatan yang diputuskan di forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan adalah mengenai isu pemberantasan stunting, sementara kebutuhan masyarakat akan pemenuhan sarana air bersih, ambulance desa, perbaikan fasilitas puskesmas pembantu, optimalisasi peran kader dan tenaga kesehatan belum seluruhnya masuk dalam usulan perencanaan pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan telah berupaya dilakukan secara partisipatif dengan upaya menggali informasi usulan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk di dalamnya kebutuhan akan pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea. Namun, dalam realisasi pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea ternyata belum menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, dimana prioritas pembangunan kesehatan di Kecamatan Towea adalah penanggulangan stunting sementara hal ini mengesampingkan kebutuhan kesehatan lainnya yang tidak kalah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexader, (2002), *Perencanaan daerah partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Aritonang, D. M. (2018). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (decentralization policy for village in law number 6 of 2014 on village). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- BPS Muna (2019). *Kabupaten Muna Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna.
- Hendri, E., Purnaningsih, N., & Saleh, A., (2014). Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaanpembangunan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 12(2).
- Imtihan, H., & Wahyunadi, F. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Neo-Bis*, 11(1), 28-40.
- Khairuddin, H. (2000). *Pembangunan masyarakat: tinjauan aspek sosiologi, ekonomi, dan perencanaan*. Liberty, Yogyakarta.
- Kurniawan, Gita. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur (Satu Kajian Kritis Sosial Ekonomi Terhadap Skala Prioritas Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*.
- Maryam, D. (2015). Perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Bina'Al-Ummah*, 10(1).
- Mayer, Robert R, (1985), *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey.

- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited, London.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Purnamasari, I. (2008). *Studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Puskesmas Towea. (2019). *Profil Puskesmas Towea tahun 2019*. Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Muna.
- Safitri, T. Y., Muchsin, S., & Widodo, R. P. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Partisipatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Tentang Pembangunan Desa Bersumber dari Pendapatan Asli Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto). *Respon Publik*, 14(5), 60-66.
- Sari, A. C. P. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Partisipatif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi Komparatif: Desa Bligo Kecamatan Candi dan Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 57-70.
- Sari, I. P. (2016). Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi UHO*, 1(1).
- Setyadiharja, R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), 71-88.
- Suwandi, S., & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261-270.
- Toar, K., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2019). Efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kawangkoan utara. *Jurnal eksekutif*, 3(3).